

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 terkait peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam penyelesaian konflik di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais Perspektif Fiqih Siyasah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 terkait peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam penyelesaian konflik di RT 08 RW 03 Kelurahan Pasar Tais belum berjalan efektif. Meskipun perda telah memberi dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih terbatas pada tugas administratif. RT belum mampu menjalankan fungsi mediasi dan penyelesaian konflik karena kurangnya sosialisasi, pelatihan, koordinasi dengan lembaga adat, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Akibatnya, tujuan perda untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan ketertiban sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 belum tercapai secara optimal.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah kepemimpinan. Pemimpin lokal seperti Ketua RT,

yang semestinya berperan sebagai wakil pemerintah untuk menjaga kerukunan dan keadilan sosial, belum menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariat dan realitas pelaksanaan di lapangan. Menurut pandangan tokoh seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali, pemimpin wajib menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Karena itu, diperlukan pembinaan dan penguatan moral kepemimpinan agar Perda ini dapat diimplementasikan sesuai nilai-nilai fiqh siyasah.

B. Saran

Pemerintah daerah Kabupaten Seluma perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di tingkat RT dan RW. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan khusus bagi Ketua RT dan perangkat kelurahan mengenai tugas dan kewenangan mereka dalam menyelesaikan konflik sosial, sehingga pelaksanaan perda tidak hanya berhenti pada tataran administratif. Pemerintah daerah juga perlu membentuk mekanisme koordinasi yang jelas antara RT, lembaga adat, dan kelurahan, sehingga peraturan daerah dapat berjalan secara sinergis dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan perda guna menilai sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat. Langkah ini

dapat memperkuat eksistensi RT sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan harmoni warga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ajis, Peran Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2022
- Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 30 Maret 2024
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008
- Al-Mawardi, "ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah Islam", (jakarta:qisthi press, 2015)
- Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015
- Appriianti. Adat di Indonesia, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)
- Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)
- Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)

Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002)

Busar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017)

Data Kelurahan pasar Tais

Deedy Sumanto, Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17 Nomor 2, Juli-Desember 2018

Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017

H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009)

H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011)

Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

<http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

<https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>, (diakses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>

<https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>

<https://www.erasmuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgXIU>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

I. G. AB Wiranata. Antropologi Budaya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 1994)

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2022)

M.Wawan Dermawan, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembagunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makasar (Perspektif Islam), eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2017

Makhya, Syarief, Ilmu Pemerintahan, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2006)

Mikel Homes, Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Universitas Riau, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2016

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 2016)

Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Randy R. Wrihhatnolo, Riant Nurgoho D, Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018)

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)

Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Press, 2017)

